



United Nations at a Glance

Sekilas Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai Tugas Kelompok
Mata Kuliah Sejarah Politik Dunia

Persembahan:

Monis Oktoperdamai Ispalestin	[20100510016]
Ahmad Chanifuddin	[20100510023]
Mohammad Ichsan	[20100510025]
Kukuh Eka Kusuma Wardana	[20100510040]
Riko Wijaya	[20100510052]
Ahlul Amalsyah	[20100510054]

DAFTAR ISI

Bab I	Sekapur Sirih	3
Bab II	Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Kenangan	4
Bab III	Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa	8
Bab IV	Struktur Perserikatan Bangsa Bangsa	17
Bab V	Indonesia dan Perserikatan Bangsa Bangsa	35
Bab VI	Daftar Pustaka	40
Bab VII	Lampiran	41

BAB I

Sekapur Sirih

Pencitraan ilmu hubungan internasional yang tak bisa lepas dari kata “perdamaian” dan “peperangan” membuat seluruh peneliti dan pelajar ilmu hubungan internasional ini juga tidak bisa lepas dengan organisasi ini. Ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hingga hari ini sejak organisasi ini berdiri, menjadi *peacekeeper* bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini.

Dalam makalah ini sengaja kami memilih dan mengetengahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar kami, mahasiswa hubungan internasional ini, “dipaksa” atau mau tidak mau menjadi tahu akan apa, siapa, dan bagaimana sepak terjang Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dan kami harapkan rekan sejawat dapat terilhami dan menambah wawasan mengenai dunia dari sudut pandang penjaga perdamaian ini.

Besar harapan kami, makalah yang kami presentasikan dihadapan dosen dan rekan sejawat lainnya dapat juga menjadi referensi ringkas dan menjadi pengetahuan awal untuk membuka lebih dalam mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa ini.

Kelompok V

BAB II

Perserikatan Bangsa Bangsa

Dalam Kenangan

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah organisasi dunia yang didirikan setelah perang dunia kedua yang disepakati oleh 51 negara untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, mengatur hubungan kerjasama antar bangsa, mempromosikan kegiatan sosial, menstandarisasi kehidupan yang lebih layak dan hak asasi manusia.

Sebelum secara resmi didirikan, telah dilakukan pertemuan demi pertemuan demi tercapainya rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antar bangsa.

PBB ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di *Church House*, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara.

Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi Moskow, Konferensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta dan Konferensi San Francisco.

Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) merupakan naskah pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya PBB. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D.

Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang Kerajaan Inggris HMS *Prince of Wales* di perairan Samudera Atlantik, tepatnya di wilayah Argentia, Newfoundland, Kanada. Naskah asli Piagam Atlantik ini dapat dilihat juga di lampiran.

Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai:

1. tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris;
2. pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan;
3. hak untuk menentukan nasib sendiri;
4. pengurangan rintangan perdagangan;
5. memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial;
6. kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran;
7. menciptakan kebebasan di laut lepas;
8. pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang

Konferensi San Fransisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Konferensi San Fransisco berlangsung selama 2 bulan yakni dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945. Peserta konferensi berjumlah 50 negara yakni 47 negara penandatanganan *Declaration of the United Nations* ditambah Ukraina, Belarusia, dan Argentina.

Kelima puluh negara ini dikenal sebagai negara anggota pendiri atau anggota asli (*original members*). Konferensi ini menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian (*Charter of Peace*) yang kemudian piagam ini menjadi Piagam PBB (United Nations Charter). Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

Tujuan PBB

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

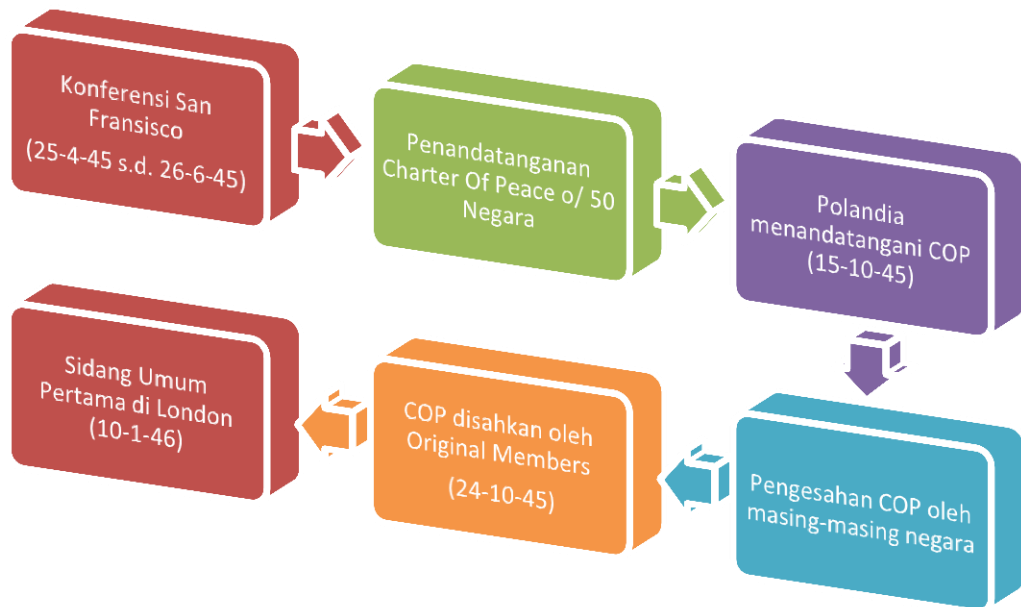
Asas PBB

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menandatangani Piagam Perdamaian, maka anggota asli berjumlah 51 negara. Walaupun piagam perdamaian itu sudah ditandatangani oleh 51 utusan dari negara-negara peserta, tetapi belum mendapat pengesahan dari pemerintah masing-masing negara.

Piagam perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara peserta pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut merupakan hari berdirinya PBB secara resmi. Pada tanggal 10 Januari 1946 Majelis Umum PBB bersidang pertama kali di London (Inggris). Sidang-sidang berikutnya diselenggarakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Succes, New York (Amerika Serikat).

Skema pendirian PBB



BAB III

Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa

Hingga 28 Juni 2006, anggota PBB adalah sejumlah 192 negara. Berikut ini adalah 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tanggal bergabungnya, setelah penerimaan Montenegro pada 28 Juni 2006. Untuk kutipan asli bab ini, dipersilakan untuk melihat lampiran *United Nations press conference*.

<u>Anggota</u>	<u>Tanggal Penerimaan</u>
Afganistan	19 November 1946
Albania	14 Desember 1955
Aljazair	8 Oktober 1962
Andorra	28 Juli 1993
Angola	1 Desember 1976
Antigua & Barbuda	11 November 1981
Argentina	24 Oktober 1945
Armenia	2 Maret 1992
Australia	1 November 1945
Austria	14 Desember 1955
Azerbaijan	2 Maret 1992
Bahama	18 September 1973
Bahrain	21 September 1971
Bangladesh	17 September 1974
Barbados	9 Desember 1966
Belarus[1]	24 Oktober 1945
Belgia	27 Desember 1945
Belize	25 September 1981
Benin	20 September 1960

<u>Anggota</u>	<u>Tanggal Penerimaan</u>
Burkina Faso	20 September 1960
Burundi	18 September 1962
Kamboja	14 Desember 1955
Kamerun	20 September 1960
Kanada	9 November 1945
Tanjung Verde	16 September 1975
Republik Afrika Tengah	20 September 1960
Chad	20 September 1960
Chili	24 Oktober 1945
Cina	24 Oktober 1945
Kolombia	5 November 1945
Komoro	12 November 1975
Kongo (Republik)	20 September 1960
Kosta Rika	2 November 1945
Pantai Gading	20 September 1960
Kroasia[3]	22 Mei 1992
Kuba	24 Oktober 1945
Siprus	20 September 1960
Republik Ceko[4]	19 Januari 1993

Bhutan	21 September 1971
Bolivia	14 November 1945
Bosnia dan Herzegovina[2]	22 Mei 1992
Botswana	17 Oktober 1966
Brasil	24 Oktober 1945
Brunei Darussalam	21 September 1984
Bulgaria	14 Desember 1955
El Salvador	24 Oktober 1945
Guinea Khatulistiwa	12 November 1968
Eritrea	28 Mei 1993
Estonia	17 September 1991
Ethiopia	13 November 1945
Fiji	13 Oktober 1970
Finlandia	14 Desember 1955
Perancis	24 Oktober 1945
Gabon	20 September 1960
Gambia	21 September 1965
Georgia	31 Juli 1992
Jerman[7]	18 September 1973
Ghana	8 Maret 1957
Yunani	25 Oktober 1945
Grenada	17 September 1974
Guatemala	21 November 1945
Guinea	12 Desember 1958
Guinea-Bissau	17 September 1974

Republik Rakyat Demokratik Korea	17 September 1991
Republik Demokratik Kongo[5]	20 September 1960
Denmark	24 Oktober 1945
Djibouti	20 September 1977
Dominika	18 Desember 1978
Republik Dominika	24 Oktober 1945
Ekuador	21 Desember 1945
Mesir[6]	24 Oktober 1945
Israel	11 Mei 1949
Italia	14 Desember 1955
Jamaika	18 September 1962
Jepang	18 Desember 1956
Yordania	14 Desember 1955
Kazakhstan	2 Maret 1992
Kenya	16 Desember 1963
Kiribati	14 September 1999
Kuwait	14 Mei 1963
Kirgizstan	2 Maret 1992
Republik Demokratik Rakyat Laos	14 Desember 1955
Latvia	17 September 1991
Lebanon	24 Oktober 1945
Lesotho	17 Oktober 1966
Liberia	2 November 1945
Libya	14 Desember 1955
Liechtenstein	18 September 1990

Guyana	20 September 1966
Haiti	24 Oktober 1945
Honduras	17 Desember 1945
Hongaria	14 Desember 1955
Islandia	19 November 1946
India	30 Oktober 1945
Indonesia ^[8]	28 September 1950
Iran	24 Oktober 1945
Irak	21 Desember 1945
Irlandia	14 Desember 1955
Mauritania	27 Oktober 1961
Mauritius	24 April 1968
Meksiko	7 November 1945
Mikronesia (Negara Federasi)	17 September 1991
Monako	28 Mei 1993
Mongolia	27 Oktober 1961
Montenegro ^[10]	28 Juni 2006
Maroko	12 November 1956
Mozambik	16 September 1975
Myanmar	19 April 1948
Namibia	23 April 1990
Nauru	14 September 1999
Nepal	14 Desember 1955
Belanda	10 Desember 1945
Selandia Baru	24 Oktober 1945
Nikaragua	24 Oktober 1945
Niger	20 September 1960

Lituania	17 September 1991
Luksemburg	24 Oktober 1945
Madagaskar	20 September 1960
Malawi	1 Desember 1964
Malaysia ^[9]	17 September 1957
Maladewa	21 September 1965
Mali	28 September 1960
Malta	1 Desember 1964
Kepulauan Marshall	17 September 1991
Polandia	24 Oktober 1945
Portugal	14 Desember 1955
Qatar	21 September 1971
Republik Korea	17 September 1991
Republik Moldova	2 Maret 1992
Rumania	14 Desember 1955
Federasi Rusia ^[11]	24 Oktober 1945
Rwanda	18 September 1962
Saint Kitts dan Nevis	23 September 1983
Saint Lucia	18 September 1979
Saint Vincent dan Grenadines	16 September 1980
Samoa	15 Desember 1976
San Marino	2 Maret 1992
Sao Tome dan Principe	16 September 1975
Arab Saudi	24 Oktober 1945
Senegal	28 September 1960
Serbia ^[12]	1 November 2000
Seychelles	21 September 1976

Nigeria	7 Oktober 1960
Norwegia	27 November 1945
Oman	7 Oktober 1971
Pakistan	30 September 1947
Palau	15 Desember 1994
Panama	13 November 1945
Papua Nugini	10 Oktober 1975
Paraguay	24 Oktober 1945
Peru	31 Oktober 1945
Filipina	24 Oktober 1945
Suriname	4 Desember 1975
Swaziland	24 September 1968
Swiss	10 September 2002
Swedia	19 November 1946
Suriah[15]	24 Oktober 1945
Tajikistan	2 Maret 1992
Thailand	16 Desember 1946
Republik Makedonia bekas Yugoslavia[16]	8 April 1993
Timor Leste	27 September 2002
Togo	20 September 1960
Tonga	14 September 1999
Trinidad dan Tobago	18 September 1962
Tunisia	12 November 1956
Turki	24 Oktober 1945
Turkmenistan	2 Maret 1992

Sierra Leone	27 September 1961
Singapura	21 September 1965
Slowakia[13]	19 Januari 1993
Slovenia[14]	22 Mei 1992
Kepulauan Solomon	19 September 1978
Somalia	20 September 1960
Afrika Selatan	7 November 1945
Spanyol	14 Desember 1955
Sri Lanka	14 Desember 1955
Sudan	12 November 1956
Zambia	1 Desember 1964
Zimbabwe	25 Agustus 1980
Tuvalu	5 September 2000
Uganda	25 Oktober 1962
Ukraina	24 Oktober 1945
Uni Emirat Arab	9 Desember 1971
Britania Raya	24 Oktober 1945
Republik Bersatu Tanzania[17]	14 Desember 1961
Amerika Serikat	24 Oktober 1945
Uruguay	18 Desember 1945
Uzbekistan	2 Maret 1992
Vanuatu	15 September 1981
Venezuela	15 November 1945
Vietnam	20 September 1977
Yaman[18]	30 September 1947

[1] Pada 19 September 1991, Byelorussia memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa telah mengubah namanya menjadi Belarus.

[2] Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Bosnia dan Herzegovina diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/46/237 22 Mei 1992.

[3] Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Kroasia diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/46/238 22 Mei 1992.

[4] Cekoslowakia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahu Sekretaris-Jenderal bahwa Republik Federal Ceko dan Slowakia dihentikan keberadaannya pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Republik Slowakia, sebagai negara penerus, akan mendaftarkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pendaftarannya diterima, Dewan Keamanan, pada 8 Januari 1993, merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Republik Ceko diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Ceko kemudian diterima pada 19 Januari tahun tersebut sebagai negara anggota.

[5] Zaire bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 September 1960. Pada 17 Mei 1997, namanya berubah menjadi Republik Demokratik Kongo.

[6] Mesir dan Suriah merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Setelah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan sebagai suatu uni antara Mesir dan Suriah dan melanjutkan sebagai anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah, melanjutkan kembali statusnya sebagai negara merdeka, melanjutkan kembali keanggotaan terpisahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2 September 1971, Republik Arab Bersatu mengubah namanya menjadi Republik Arab Mesir.

[7] Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Melalui aksesinya Republik Demokratik Jerman ke dalam Republik Federal Jerman, efektif sejak 3 Oktober 1990, dua negara Jerman bersatu membentuk satu negara berdaulat.

[8] Melalui surat 20 Januari 1965, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa “pada tahap ini dan sesuai keadaan saat ini”. Melalui telegram 19 September 1966, Indonesia mengumumkan keputusannya “untuk melanjutkan kembali kerja sama penuh dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk melanjutkan kembali partisipasi dalam seluruh kegiatannya”. Pada 28 September 1966, Majelis Umum mencatat keputusan ini. Lebih jelasnya silakan untuk melihat Bab Indonesia dan PBB di makalah ini.

[9] Federasi Malaya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 1957. Pada 16 September 1963, namanya berubah menjadi Malaysia, setelah penerimaan federasi baru Singapura, Sabah (Kalimantan Utara) dan Sarawak. Singapura menjadi negara merdeka

pada 9 Agustus 1965 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 September 1965.

[10] Montenegro menyelenggarakan referendum 21 Mei 2006 dan mendeklarasikan diri merdeka dari Serbia pada 3 Juni. Pada 28 Juni 2006, Montenegro diterima sebagai negara anggota oleh resolusi Majelis Umum A/RES/60/264.

[11] Uni Republik Sosialis Soviet merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 24 Desember 1991, Boris Yeltsin, Presiden Federasi Rusia, memberitahu Sekretaris-Jenderal bahwa keanggotaan Uni Soviet di dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dilanjutkan oleh Federasi Rusia dengan dukungan dari 11 negara anggota Persemakmuran Negara Merdeka.

[12] Dalam surat tertanggal 3 Juni 2006, Presiden Republik Serbia memberitahu Sekretaris Jenderal bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro dilanjutkan oleh Republik Serbia, setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro. Pada 4 Februari 2003, setelah adopsi Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia, nama resmi “Republik Federal Yugoslavia” berubah menjadi Serbia and Montenegro. Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Federal Yugoslavia diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/55/12 1 November 2000.

[13] Cekoslowakia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 10 Desember 1992, perwakilan tetap-nya memberitahu Sekretaris-

Jenderal bahwa Republik Federal Ceko dan Slowakia dihentikan keberadaannya pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Republik Slowakia, sebagai negara penerus, akan mendaftarkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pendaftarannya diterima, Dewan Keamanan, pada 8 Januari 1993, merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Republik Slowakia diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Slowakia kemudian diterima pada 19 Januari tahun tersebut sebagai negara anggota.

[14] Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Slovenia diterima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/46/236 22 Mei 1992.

[15] Mesir dan Suriah merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Setelah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan sebagai suatu uni antara Mesir dan Suriah dan melanjutkan sebagai anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah, melanjutkan kembali statusnya sebagai negara merdeka, melanjutkan kembali keanggotaan terpisahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

[16] Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Melalui resolusi A/RES/47/225 8 April 1993, Majelis Umum memutuskan untuk menerima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang, untuk sementara, dirujuk untuk segala tujuan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

sebagai “Republik Makedonia bekas Yugoslavia” menunggu penyelesaian terhadap perbedaan yang timbul atas namanya.

[17] Tanganyika merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 14 Desember 1961 dan Zanzibar merupakan anggota sejak 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi Perjanjian Penggabungan antara Tanganyika dan Zanzibar pada 26 April 1964, Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar melanjutkan sebagai anggota tunggal, mengubah namanya menjadi Republik Bersatu Tanzania pada 1 November 1964.

[18] Yaman diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1947 dan Demokratik Yaman pada 14 Desember 1967. Pada 22 Mei 1990, dua negara tersebut bergabung dan sejak saat itu diwakili sebagai anggota tunggal dengan nama “Yaman”.

BAB IV

Struktur Perserikatan Bangsa Bangsa

A. Badan Badan Utama PBB

1. Majelis Umum

Majelis umum adalah badan permusyawaratan utama yang terdiri dari wakil-wakil negara negara anggota yang masing-masing memiliki satu suara. Fungsi dan kekuasaan Majelis Umum sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyusun rekomendasi mengenai prinsip-prinsip kerjasama dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pelucutan senjata dan pengaturan persenjataan.
- b. Membahas masalah yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional serta membuat rekomendasinya, kecuali untuk pertikaian yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan.
- c. Mendiskusikan dan membuat rekomendasi mengenai masalah apa saja dalam jangkauan piagam atau berdampak pada kekuasaan dan fungsi badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
- d. Memprakarsai studi dan membuat rekomendasi untuk menggalakkan kerjasama politik internasional; pelaksanaan HAM dan kebebasan fundamental (asasi) untuk semua, serta kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- e. Membuat rekomendasi untuk penyelesaian secara damai atas segala situasi tanpa mempersoalkan dari mana asalnya, yang mungkin mengganggu hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa.
- f. Menerima dan membahas laporan-laporan dari dewan keamanan dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lainnya;

- g. Membahas dan menyetujui anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menentukan sumbangan anggota;
- h. Memilih anggota tidak tetap untuk dewan keamanan, dewan ekonomi, sosial dan perwalian yang terpilih; bersama dewan keamanan memilih para hakim untuk mahkamah internasional dan berdasarkan rekomendasi dewan keamanan mengangkat sekretaris jendral.

Akan tetapi berdasarkan resolusi “persatuan untuk perdamaian” yang di cetuskan oleh majelis umum bulan November 1950, majelis umum bisa mengambil tindakan jika kurangnya persatuan dewan keamanan diantara anggota tetapnya, serta gagal mengambil tindakan saat munculnya ancaman terhadap perdamaian, dan pelanggaran terhadap perdamaian atau agresi.

2. Dewan Keamanan

Tanggung jawab utama dewan keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Adapun fungsi dari Dewan keamanan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB;
- b. Menyelidiki pertikaian apa saja, atau keadaan yang dianggap bisa menyebabkan pertentangan internasional;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian pertikaian atau ketentuan–ketentuan penyelesaian;
- d. Memformulasikan rencana pembentukan satu sistem untuk mengatur persenjataan;
- e. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil;

- f. Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melaksanakan sanksi ekonomi dan tindakan yang lainnya tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi;
- g. Mengambil tindakan militer terhadap agresor;
- h. Merekomendasikan diterimanya anggota baru dan jangka waktu dimana negara bisa menjadi pihak dari statuta mahkamah internasional;
- i. Melaksanakan fungsi perwakilan dari “wilayah-wilayah strategis” PBB;
- j. Merekomendasikan kepada mejelis umum mengangkat sekretaris jenderal, bersama-sama dengan majelis umum, memilih para hakim mahkamah internasional.

Suatu negara yang terkena tindakan pencegahan atau pelaksanaan paksa dari ketentuan dewan keamanan. Jika suatu negara melanggar terus menerus prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam dan bisa dikeluarkan oleh majelis atas rekomendasi dewan keamanan.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi dan Sosial dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja di bidang ekonomi dan sosial serta lembaga-lembaga khususnya. Adapun fungsi Dewan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sentral untuk pembahasan masalah-masalah ekonomi dan sosial internasional yang bersifat global atau antara disiplin dan formulasi rekomendasi kebijaksanaan dari masalah tersebut kepada anggota dan jajaran PBB secara keseluruhan;
- b. Melaksanakan atau memprakarsai studi dan laporan serta membuat rekomendasi mengenai ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah yang bertalian;
- c. Menggalakkan penghormatan dan kepatuhan pada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua;

- d. Menyerukan diadakannya konferensi-konferensi internasional dan menyusun rancangan kovenan untuk disampaikan kepada majelis umum mengenai masalah yang berada dibawah kompetensinya;
- e. Merundingkan persetujuan dengan badan-badan khusus dan menentukan hubungannya dengan PBB;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan badan-badan khusus melalui konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada badan-badan tersebut. Sedangkan dengan majelis umum dan anggota PBB dengan cara pemberian rekomendasi;
- g. Memberikan pelayanan dengan persetujuan majelis, untuk negara-negara anggota PBB dan berdasarkan permintaan untuk negara-negara khusus;
- h. Melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dengan masalah-masalah yang ditangani oleh dewan.

Pada umumnya Dewan Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan sidang selama dua bulan dalam setiap tahunnya, yang berlangsung di New York dan Jenewa. Pekerjaan dewan selama setahun dilaksanakan oleh badan-badan tambahan yang terdiri dari komisi-komisi dan komite-komite yang kemudian mengadakan pertemuan sewaktu-waktu dan memberikan laporan kepada dewan.

4. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian adalah salah satu badan utama PBB yang memberikan tugas kepada dewan untuk mengawasi pemerintah wilayah-wilayah perwalian yang berada di bawah sistem perwalian tersebut yang bertujuan meningkatkan kemajuan penduduk di wilayah-wilayah perwalian dan pertumbuhan mereka yang cepat menuju pemerintahan sendiri atau merdeka.

Adapun fungsi dan kekuasaan dari dewan perwalian adalah kewenangan untuk mengkaji dan mendiskusikan laporan dari negara pengelola mengenai kemajuan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dari rakyat di wilayah perwalian dan

dengan konsultasi dengan negara pengelola, dewan mengkaji petisi dari wilayah perwalian dan mengirimkan misi secara periodik maupun misi-misi khusus yang lainnya.

5. Mahkamah Internasional

Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon nasehat kepada mahkamah atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

Mahkamah ini terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai "anggota" mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah.

6. Sekretariat

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh staff pekerja sipil internasional. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.

Adapun fungsi dari sekretariat ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai kepala administratif PBB
- b. Membawa kedepan dewan keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
- c. Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada majelis umum mengenai pekerjaan PBB

Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, salah satu bagian penting dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal PBB dari masa ke masa ialah sebagai berikut

1. Sir Gladwyn Jebb

Sir Gladwyn Jebb berasal dari Britania Raya yang menjabat sebagai Sekretaris PBB sejak 24 Oktober 1945 sampai dengan 2 Februari 1946. Tercatat Sir Gladwyn Jebb ini hanya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB sementara.

2. Trygve Halvdan Lie

Trygve Halvdan Lie adalah sekretaris PBB kedua yang berasal dari Norwegia yang meneruskan jabatan dari Sir Gladwyn Jebb sejak 2 Februari 1946 dan akhirnya mengundurkan diri pada 10 November 1952.

3. Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld ini berasal dari Swedia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PBB sejak 10 April 1953 hingga masa jabatannya berakhir ketika dia mengalami kecelakaan pesawat di Rhodesia Utara (sekarang menjadi Zambia) pada 18 September 1961.

4. U Thant

U Thant adalah sekretaris Jendral PBB yang pertama dari Asia, tepatnya berasal dari Burma yang sekarang menjadi Myanmar. U Thant menjabat sebagai Sekretaris Jendral PBB sejak 30 November 1961 sampai di masa jabatannya yang kedua ini dia mengundurkan diri tepatnya pada 31 Desember 1971.

5. Kurt Waldheim

Kurt Waldheim adalah Sekretaris Jendral PBB kelima yang berasal dari Austria. Masa jabatannya dimulai pada 1 Januari 1972 dan berakhir pada 31 Desember 1981 ketika Republik Rakyat China mengajukan hak veto untuk periode ketiga masa jabatannya.

6. Javier Pérez de Cuéllar

Javier Pérez de Cuéllar adalah Sekretaris Jendral PBB yang berasal dari Peru. Tanggal 1 Januari 1982 adalah awal masa jabatannya hingga periode kedua masa jabatannya tanggal 31 Desember 1991. Namun Javier Pérez de Cuéllar menolak masa jabatannya untuk yang ketiga kalinya.

7. Boutros Boutros-Ghali

Boutros Boutros-Ghali adalah Sekretaris Jendral PBB ketujuh yang berasal dari Mesir. Awal masa jabatannya adalah pada tanggal 1 Januari 1992. Namun ketika hendak memasuki masa jabatannya yang kedua, Amerika Serikat mengajukan hak veto untuk masa jabatannya yang kedua. Sehingga berakhirilah masa jabatannya pada 31 Desember 1996.

8. Kofi Annan

Kofi Annan ini adalah Sekretaris Jendral PBB yang berasal dari Benua Afrika, tepatnya yaitu dari Ghana. Kofi Annan memulai masa jabatannya pada 1 Januari 1997 dan berakhir pada 31 Desember 2006.

9. Ban-ki Moon

Ban-ki Moon ini adalah Sekretaris Jendral PBB kedua yang berasal dari Asia setelah U Thant dari Myanmar. Dia memulai masa jabatannya pada 1 Januari 2007 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Sekretaris Jendral PBB. Masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember 2011 ini.

B. Badan-Badan Antar-Pemerintah yang Berhubungan dengan PBB

1. Badan Tenaga Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA)

IAEA disetujui tanggal 26 Oktober 1956 dalam satu konferensi internasional yang berlangsung di markas besar PBB. Badan tersebut didirikan di Wina tanggal 29 Juli 1957 dan disetujui oleh Majelis Umum untuk berhubungan dengan PBB pada tanggal 14 November 1957.

IAEA mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk meningkatkan dan memperbesar sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran di seluruh dunia dan untuk menjamin bahwa bantuan yang diberikannya; atau atas permintaannya; atau dibawah pengawasan atau kendalinya dengan jalan apapun tidak untuk mengejar tujuan militer.

Tugas utama IAEA adalah melaksanakan pengawasan untuk menjamin bahwa bahan-bahan dan perlengkapan nuklir yang dimaksudkan untuk tujuan damai dan tidak disalahgunakan ke tujuan militer.

2. Organisasi Perburuhan Internasional / *International Labor Organization* (ILO)

Badan ini berdiri tahun 1919 berdasarkan perjanjian Versailles. Persetujuan mengenai hubungan ILO dengan PBB sendiri disetujui tanggal 14 Desember 1946. Organisasi ini menjadi badan khusus pertama yang berasosiasi dengan PBB.

ILO bekerja untuk menggalakkan keadilan sosial untuk rakyat pekerja dimana saja. ILO memformulasikan kebijaksanaan dan program internasional untuk membantu perbaikan kondisi kerja dan kehidupan; menyusun standar perburuhan internasional yang akan menjadi petunjuk bagi para penguasa nasional dalam melaksanakan kebijaksanaan tadi; melaksanakan program kerjasama teknis untuk

membantu pemerintah dalam membuat kebijaksanaan tadi efektif dalam kenyataan; dan terlibat dalam pelatihan, pendidikan dan riset untuk memajukan upaya tersebut.

Salah satu fungsi yang paling penting dari badan ini adalah pencetusan konvensi dan rekomendasi yang menetapkan standar perburuhan internasional.

3. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa / *Food and Agriculture Organization* (FAO)

FAO didirikan dalam suatu konferensi yang berlangsung di Quebec City tanggal 16 Oktober 1945. Sejak tahun 1981, tanggal 16 Oktober setiap tahunnya dirayakan sebagai hari pangan sedunia.

Tujuan FAO adalah untuk meningkatkan gizi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan distribusi dari semua produk pangan dan pertanian, kehutanan dan perikanan; menggalakkan pembangunan pedesaan dan memperbaiki taraf hidup penduduk pedesaan; menghapuskan kelaparan.

4. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa / *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)

Konstitusi UNESCO dipersiapkan oleh satu konferensi yang berlangsung di London tahun 1945. UNESCO akhirnya terbentuk pada 4 November 1946.

Tujuan utama UNESCO adalah memberikan sumbangan kepada perdamaian dan keamanan di dunia dengan menggalakkan kerjasama diantara bangsa bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi.

5. Organisasi Kesehatan Dunia / *World Health Organization* (WHO)

Badan ini lahir pada tanggal 7 April 1948 ketika 26 negara anggota PBB telah meratifikasi konstitusinya dan pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia setiap tahunnya.

Tujuan WHO sendiri adalah pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua bangsa. Prioritas utama WHO adalah “Kesehatan untuk Semua di Tahun 2000” telah ditetapkan oleh Majelis Umum sejak 1977.

6. BANK DUNIA

Bank dunia terdiri dari 4 lembaga, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), Badan Keuangan Internasional (IFC), Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), dan Badan Jaminan Penanaman Modal Multilateral (MIGA).

Tujuan utama keempat lembaga tersebut adalah untuk membantu meningkatkan taraf hidup di negara-negara yang sedang berkembang dengan menyalurkan sumber uang kenegara-negara tersebut dari negara-negara maju.

a. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan / *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD)

IBRD didirikan pada tahun 1945. Bank ini didirikan untuk membantu dalam rekonstruksi dan pembangunan wilayah anggotanya dengan mempermudah investasi modal untuk tujuan produktif; menggalakkan investasi asing dan swasta; menggalakkan pertumbuhan berimbang dan luas dari perdagangan internasional dan mempertahankan keseimbangan pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk pengembangan sumber-sumber produktif dari anggota.

b. Asosiasi Pembangunan Internasional / *International Development Association* (IDA)

Munculnya kebutuhan untuk memberikan pinjaman kepada banyak negara miskin dengan syarat-syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan syarat Bank Dunia pada tahun 1950an, menginspirasi untuk dicetuskannya IDA. Akhirnya IDA terbentuk pada tahun 1960 yang berafiliasi dengan bank dunia untuk membantu dalam mencapai tujuannya tersebut.

c. Badan Keuangan Internasional / *International Finance Corporation* (IFC)

IFC didirikan pada tahun 1956 yang bertujuan untuk membantu dalam pendanaan perusahaan swasta yang bisa memberikan dukungan pada pembangunan dengan melakukan investasi tanpa jaminan pembayaran oleh pemerintah anggota yang bersangkutan; menggabungkan kesempatan investasi, modal dalam dan luar negeri dan manajemen yang berpengalaman; dan untuk mendorong arus kapital swasta di dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi yang produktif di negara-negara anggota.

d. Badan Jaminan Penanaman Modal Multilateral / *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA)

MIGA secara resmi didirikan pada bulan April 1988. Tujuan dasar MIGA adalah untuk mempermudah arus investasi swasta untuk tujuan produktif ke negara-negara anggota yang sedang berkembang dengan menawarkan asuransi resiko politik jangka panjang untuk investor dan dengan memberikan pelayanan konsultasi.

7. Dana Moneter Internasional / *International Monetary Fund* (IMF)

IMF didirikan pada bulan Desember 1945 yang merupakan organisasi antar-pemerintah yang bertujuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I dari pasal-pasal perjanjiannya, antara lain :

- a. Menggalakkan kerjasama internasional
- b. Membantu pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang
- c. Meningkatkan stabilitas mata uang dan pengaturan mata uang dengan tepat dan membantu mencegah kompetisi depresiasi mata uang
- d. Membina sistem pembayaran dan transfer multilateral dan berupaya melenyapkan hambatan mata uang asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan internasional
- e. Membuat sumber dana tersedia secara sementara untuk anggota dibawah pengawasan yang memadai untuk memungkinkan negara anggota untuk mengoreksi kesalahan dalam neraca pembayaran tanpa menempuh jalan yang mengganggu kesejahteraan nasional dan internasional

- f. Memperpendek jangka waktu dan besarnya ketidakseimbangan pembayaran

Fungsi utama dari IMF adalah untuk mengelola aturan permainan yang berhubungan dengan kebijaksanaan mata uang dan batasan pembayaran untuk transaksi rekening; memberikan sumber finansial kepada anggota untuk memungkinkan mereka mematuhi aturan permainan sementara mereka mengoreksi atau menghindari neraca pembayaran yang tidak berimbang; dan menyediakan satu forum dimana para anggota bisa berkonsultasi satu sama lain dan bekerjasama dalam masalah moneter internasional.

8. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional / *International Civil Aviation Organization* (ICAO)

ICAO didirikan pada 4 April 1947. Tujuannya adalah menjamin keamanan dan penerbangan sipil internasional yang teratur; mendorong rancangan dan operasi pesawat terbang untuk tujuan damai; mendukung pembangunan lalu lintas udara, bandara dan fasilitas navigasi untuk penerbangan sipil; dan memenuhi kebutuhan masyarakat internasional akan angkutan udara yang aman, regular, efisien dan hemat.

9. Perhimpunan Pos Universal / *Universal Postal Union* (UPU)

Badan ini didirikan pada tanggal 9 Oktober 1874 berdasarkan Perjanjian Berne (Berne Treaty). UPU merupakan wilayah pos satu-satunya dari negara untuk saling bertukar benda-benda pos. Tujuannya adalah untuk menjamin organisasi dan perbaikan pelayanan pos; mengambil bagian dalam bantuan teknis pos yang diperlukan oleh negara anggota UPU; dan untuk menggalakkan kerjasama internasional di bidang pos.

10. Perhimpunan Telekomunikasi Internasional / *International Telecommunication Union* (ITU)

ITU didirikan di Paris pada tahun 1865 sebagai Perhimpunan Telegraf Internasional. Kemudian namanya berganti menjadi International Telecommunication Union (ITU)

pada tahun 1934 setelah dicetuskannya Konvensi Telekomunikasi Internasional di Madrid tahun 1932.

ITU bertujuan untuk menjaga dan memperluas kerjasama internasional untuk kemajuan dan penggunaan semua jenis telekomunikasi secara rasional untuk mendorong pembangunan fasilitas teknis dan pengoperasiannya secara efisien dengan tujuan untuk mengembangkan efisiensi pelayanan telekomunikasi, meningkatkan kegunaannya dan tersedia untuk publik dan menyelaraskan langkah negara dalam mencapai tujuan ini.

11. Organisasi Meteorologi Dunia / *World Meteorological Organization* (WMO)

WMO berdiri berdiri berdasarkan konvensi dan untuk menggantikan Organisasi Meteorologi Internasional yang telah berdiri sejak 1873. Konvensi tersebut disetujui pada tahun 1947 dan mulai berlaku tanggal 23 Maret 1950. Barulah tahun 1951 WMO disetujui bekerjasama dengan PBB dan menyandang status Badan Khusus.

Organisasi ini bertujuan untuk mendukung kerjasama internasional dalam pembangunan jaringan stasiun observasi meteorologi dan hidrologi dan pengamat geofisika lainnya yang berhubungan dengan meteorologi dan menggalakkan pembentukan dan penjagaan pusat-pusat yang bertanggung jawab dalam pelayanan meteorologi dan pelayanan lain yang berkaitan dengan bidang ini; menggalakkan pembentukan dan penjagaan sistem pertukaran informasi meteorologi dan informasi lain dengan cepat; menggalakkan standarisasi pengamatan meteorologi dan informasi yang lain dan menjamin keseragaman penerbitan mengenai pengamatan dan statistik; melaksanakan aplikasi lanjutan di bidang penerbangan, pelayaran, masalah air, pertanian dan kegiatan lain; meningkatkan kegiatan di bidang hidrologi operasional dan mempererat kerjasama antara pelayanan meteorologi dan hidrologi; dan mendorong riset dan pelatihan di bidang meteorologi dan jika perlu di bidang yang berkaitan dan membantu dalam koordinasi aspek internasional dari pelatihan riset.

12. Organisasi Maritim Internasional / *International Maritime Organization* (IMO)

IMO dilahirkan dari konvensi yang dirancang tahun 1948 di dalam konferensi maritim PBB di Jenewa Swiss. Konvensi tersebut berlaku tanggal 17 Maret 1958. IMO menyediakan mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi di antara pemerintah mengenai masalah teknis yang berdampak terhadap pelayaran internasional yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Organisasi ini juga mendorong dicetuskannya standar tertinggi dan bisa dilaksanakan di dalam bidang yang berkaitan dengan keamanan maritim, efisiensi navigasi dan pencegahan serta pengawasan pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal.

13. Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia / *World Intellectual Property Organization* (WIPO)

WIPO sebenarnya berasal dari Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri tahun 1883 dan Konvensi Berne untuk perlindungan Kesusastaan dan Karya Artistik tahun 1886. Konvensi yang melahirkan WIPO ditandatangani tahun 1967 dan berlaku tahun 1970. WIPO menjadi badan khusus PBB pada 17 Desember 1974.

Tujuan utama WIPO adalah menjaga dan meningkatkan penghormatan atas hak milik intelektual di seluruh dunia, untuk membantu pengembangan industri dan budaya dengan mendorong kegiatan kreatif dan mempermudah alih teknologi dan penyebaran kesusastaan dan karya artistik. Hak milik internasional terdiri dari dua cabang utama, yaitu : Hak milik industri, hak cipta dan hak serta.

14. Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian / *International Fund for Agricultural Development* (IFAD)

Tanggal 13 Juni 1976 dicetuskan persetujuan untuk mendirikan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan siap ditandatangani tanggal 20 Desember 1976. Persetujuan tersebut berlaku tanggal 30 November 1977.

Dibentuknya IFAD bertujuan untuk memobilisasikan sumber untuk meningkatkan produksi pangan dan perbaikan gizi di kalangan kelompok penduduk berpenghasilan rendah di negara-negara yang sedang berkembang.

15. Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa Bangsa / *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO)

Badan ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB tahun 1996. UNIDO resmi beralih menjadi badan khusus pada 1 Januari 1986. UNIDO merupakan pusat koordinasi dalam jajaran PBB di dalam bidang pembangunan industri.

UNIDO merupakan organisasi yang bertujuan untuk menggalakkan dan meningkatkan industrialisasi negara-negara yang sedang berkembang dan mengkoordinasikan kegiatan PBB di bidang ini.

16. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan / *General Agreement for Tariffs and Trade* (GATT)

GATT mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 dan merupakan satu satunya instrumen multilateral yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui untuk perdagangan internasional.

Tujuan utama GATT adalah untuk meliberalisasikan perdagangan dunia dan menempatkannya di tempat yang aman, sehingga memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa-bangsa.

17. Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim / *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)

IPCC adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, *World Meteorological Organization* (WMO) dan *United Nations Environment Program* (UNEP) untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia.

18. Komisi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa / *United Nations on Commission on Human Rights* (UNCHR)

UNCHR adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah *UN Economic and Social Council* (ECOSOC), dan juga dibantu oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

19. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)

UNCTAD adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.

20. Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Development Program* (UNDP)

UNDP adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Badan ini dibentuk tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB).

21. Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi / *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Sesuai namanya, badan ini mengurus tentang pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

22. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Human Rights Council* (UNHRC)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, walaupun ditentang Amerika Serikat.

23. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Environment Program* (UNEP)

UNEP berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan *sustainable development* di dunia. Badan ini didirikan pada Juni 1972.

24. Program Pengontrol Obat-Obatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations International Drugs Control Program* (UNDCP)

UNDCP adalah bagian dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang sebelumnya disebut *United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention* (ODCCP). Badan ini bertugas untuk Program Pengendalian Narkoba.

25. Program Pemukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Human Settlements Program* (UN-HABITAT)

UN-HABITAT adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tempat tinggal manusia. Didirikan tahun 1978 dan bertujuan untuk mempromosikan secara sosial dan lingkungan kota yang stabil dengan tujuan memberikan perlindungan sama bagi semua orang.

26. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

UNICEF didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Badan ini bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

27. Badan Bantuan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations Relief and Work Agency* (UNRWA).

UNRWA adalah sebuah badan pembangunan bantuan dan manusia, memberikan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan bantuan darurat kepada empat ratus ribu pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon dan Syria, juga di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Merupakan satu-satunya badan yang ditujukan untuk membantu pengungsi dari satu daerah atau konflik tertentu.

BAB V

Indonesia dan Perserikatan Bangsa Bangsa

Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat menjadi anggota yang ke-60 PBB. Banyak manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan PBB telah dinikmati bangsa Indonesia yaitu:

- a. PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dalam Perang Kemerdekaan (1945-1950) dengan mengirimkan KTN¹ dan UNCI².
- b. PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI dengan mengirim misi UNTEA³.

¹ Komite ini awalnya hanyalah sebagai *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

² UNCI (*United Nations Commission For Indonesia*) mempunyai tugas untuk membantu melancarkan perundingan, mengurus pengembalian pemerintah RI dan berhak membantu dengan menyampaikan usul-usul guna penyelesaian konflik di Indonesia-Belanda. Peran dan tugas UNCI di Indonesia adalah :

1. Pada tanggal 36 Maret 1949 mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan.
2. UNCI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Cohran (Wakil dari Amerika Serikat) pada tanggal 17 April 1949.
3. Berhasil membawa Indonesia-Belanda kedalam perundingan Rpem-Royen.
4. Mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus- 2 Nopember 1949.

³ UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaan sekretaris jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York.

- c. PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui organisasi khusus, seperti IMF, IBRD, UNESCO, WHO, dan sebagainya.
- d. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB;
- e. PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville;
- f. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI adalah mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.
- g. PBB juga berperan dalam penyelesaian masalah Irian Barat PBB membentuk pemerintahan sementara yang bernama UNTEA. Pada tanggal 1 Maret 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia;
- h. Saat pelaksanaan Pepera tahun 1969, utusan PBB yang diwakili Ortis Sanz hadir. Ortis Sanz juga membawa hasil Pepera ke dalam sidang umum PBB.

Kiprah Indonesia di PBB

- a. Indonesia aktif dan turut bergabung dalam misi perdamaian PBB dengan mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda
- b. Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara, dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Ini merupakan kali ketiga Indonesia ditunjuk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB setelah periode 1974-1975 dan 1995-1996. Mulai 7 Januari 2007, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia diberi kehormatan bersama-sama dengan lima negara besar (AS, Inggris, Prancis, China, Rusia) dan sembilan negara lain untuk memutuskan upaya-upaya mengatasi setiap konflik besar yang mengundang perhatian internasional. Tetapi Indonesia bersama sembilan negara terpilih hanya berstatus sebagai anggota tidak tetap.

Indonesia keluar dari PBB

Indonesia merupakan negara pertama dan hingga kini merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB pada 17 Januari 1965. Hal tersebut dikarenakan kekecewaan Bung Karno atas terpilihnya Malaysia yang waktu itu dianggapnya sebagai antek kolonialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, meskipun Indonesia telah mengusulkan agar Malaysia tidak masuk dalam keanggotaan DK PBB. Selain itu Bung Karno juga kecewa terhadap kebijakan PBB yang dianggapnya penuh dengan pengaruh kepentingan negara-negara Barat.

Setelah pengunduran Indonesia dari keanggotaan PBB, Bung Karno berinisiatif membentuk organisasi tandingan PBB yaitu CONEFO (*Conference of The New Emerging Forces*) yang beranggotakan negara-negara dunia ketiga (akan tetapi konferensi belum sempat dilaksanakan dan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi konferensi, kini adalah gedung DPR di Senayan). Serta GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) sebagai tandingan dari OLIMPIADE yang berhasil dilaksanakan pada bulan November 1963 dan diikuti oleh 2200 atlet dari 48 negara.

Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan internasional. Kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dapat dirasakan lagi. Begitu pula pembangunan negara menjadi terhambat sehingga berakibat pada kesengsaraan rakyat. Menyadari adanya kerugian itu, maka pemerintah Orde Baru memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di PBB. Indonesia tetap diterima kembali sebagai anggota PBB yang ke-60. Tindakan Indonesia ini mendapat dukungan dari Aljazair, Filipina, Jepang, Mesir, Pakistan, dan Thailand.

6 alasan Indonesia keluar dari PBB

Pertama, soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam suasana perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet lengkap dengan perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru berada di salah satu negara pelaku perang dingin

tersebut. Bung Karno mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau daerah netral lain di luar blok Amerika dan Soviet.

Kedua, PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa menyelesaikan pertikaian antarnegara secara cepat dan menentukan. Akan tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi konflik antar negara. Indonesia mengalami dua kali, yakni saat pembebasan Irian Barat dan Malaysia. Dalam kedua perkara itu, PBB tidak membawa penyelesaian, kecuali hanya menjadi medan perdebatan. Selain itu, pasca perang dunia II, banyak negara baru, yang baru saja terbebas dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam *preamble*-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional.

Ketiga, Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan. Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya.

Keempat, soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tidak heran jika hasil kebijakannya banyak mengakomodasi kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistem Barat. Bung Karno tidak dapat menunjang tinggi sistem itu dengan dasar, "Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kandung dari sistem negara barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme."

Kelima, Bung Karno menganggap PBB *keblinger* dengan menolak perwakilan Cina, sementara di Dewan Keamanan duduk Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia. Di mata Bung Karno, "Dengan mengesampingkan bangsa yang besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia."

Keenam, tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam lembaga-lembaganya. Bekas ketua UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan Malaysia, maka plebisit yang gagal yang diselenggarakan PBB, diketuai orang Amerika bernama Michelmores.

Dubes RI untuk PBB

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Lambertus Nicodemus Palar | (1950-1953) |
| 2. Sudjarwo tjondronegoro | (1953-1957) |
| 3. Ali Sastroamidjojo | (1957-1960) |
| 4. Soekardjo Wirjopranoto | (1960-1962) |
| 5. Lambertus Nicodemus Palar | (1962-1965) |
| 6. Dr. H. Roeslan Abdulgani | (1967-1971) |
| 7. Yoga Soegomo | (1971-1974) |
| 8. Ch. Anwar Sani | (1974-1979) |
| 9. Abdullah Kamil | (1979-1982) |
| 10. Ali Alatas | (1982-1988) |
| 11. Nana Sutresna | (1988-1992) |
| 12. Noegroho Wisnumurti | (1992-1997) |
| 13. Makarim Wibisono | (1997-2001) |
| 14. Makmur Widodo | (2001-2004) |
| 15. Rezlan Ishar Jenie | (2004-2007) |
| 16. Marty Natalegawa | (2007-2009) |
| 17. Hasan Kleib | (2009-sekarang) |

BAB VI

Daftar Pustaka

www.awalmula.com

www.duniabaca.com

www.un.org

www.wikipedia.com

www.yahooanswer.com

BAB VII

Lampiran

THE Atlantic Charter

THE President of THE UNITED STATES OF AMERICA and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing HIS MAJESTY'S GOVERNMENT IN THE UNITED KINGDOM, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

1. *Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.*

2. *They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.*

3. *They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.*

4. *They will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.*

5. *They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.*

6. *After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling*

in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want.

7. *Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.*

8. *They believe that all of the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.*

FRANKLIN D. ROOSEVELT

WINSTON S. CHURCHILL

August 14, 1941



Press Release

United Nations Information Services, Bangkok

Press Release: L/37/06
3 July 2006

UNITED NATIONS MEMBER STATES

These are the 192 Member States of the United Nations with dates on which they joined the Organization, following the admission Montenegro on 28 June 2006:

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Afghanistan	19 November 1946
Albania	14 December 1955
Algeria	8 October 1962
Andorra	28 July 1993
Angola	1 December 1976
Antigua and Barbuda	11 November 1981
Argentina	24 October 1945
Armenia	2 March 1992
Australia	1 November 1945
Austria	14 December 1955
Azerbaijan	2 March 1992
Bahamas	18 September 1973
Bahrain	21 September 1971
Bangladesh	17 September 1974
Barbados	9 December 1966
Belarus ¹	24 October 1945
Belgium	27 December 1945
Belize	25 September 1981
Benin	20 September 1960
Bhutan	21 September 1971
Bolivia	14 November 1945

1 On 19 September 1991, Byelorussia informed the United Nations that it had changed its name to Belarus.

(more)

For information media • not an official record • also available at www.un.org/apps/pressreleases

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Bosnia and Herzegovina ²	22 May 1992
Botswana	17 October 1966
Brazil	24 October 1945
Brunei Darussalam	21 September 1984
Bulgaria	14 December 1955
Burkina Faso	20 September 1960
Burundi	18 September 1962
Cambodia	14 December 1955
Cameroon	20 September 1960
Canada	9 November 1945
Cape Verde	16 September 1975
Central African Republic	20 September 1960
Chad	20 September 1960
Chile	24 October 1945
China	24 October 1945
Colombia	5 November 1945
Comoros	12 November 1975
Congo (Republic of the)	20 September 1960
Costa Rica	2 November 1945
Côte d'Ivoire	20 September 1960
Croatia ³	22 May 1992
Cuba	24 October 1945

2 The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the United Nations, the Charter having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified 19 October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia. The Republic of Bosnia and Herzegovina was admitted as a Member of the United Nations by General Assembly resolution A/RES/46/237 of 22 May 1992.

3 The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the United Nations, the Charter having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified 19 October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia. The Republic of Croatia was admitted as a Member of the United Nations by General Assembly resolution A/RES/46/238 of 22 May 1992.

(more)

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Cyprus	20 September 1960
Czech Republic ⁴	19 January 1993
Democratic People's Republic of Korea	17 September 1991
Democratic Republic of the Congo ⁵	20 September 1960
Denmark	24 October 1945
Djibouti	20 September 1977
Dominica	18 December 1978
Dominican Republic	24 October 1945
Ecuador	21 December 1945
Egypt ⁶	24 October 1945
El Salvador	24 October 1945
Equatorial Guinea	12 November 1968
Eritrea	28 May 1993
Estonia	17 September 1991
Ethiopia	13 November 1945
Fiji	13 October 1970
Finland	14 December 1955
France	24 October 1945
Gabon	20 September 1960
Gambia	21 September 1965

4 Czechoslovakia was an original Member of the United Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 December 1992, its Permanent Representative informed the Secretary-General that the Czech and Slovak Federal Republic would cease to exist on 31 December 1992 and that the Czech Republic and the Slovak Republic, as successor States, would apply for membership in the United Nations. Following the receipt of its application, the Security Council, on 8 January 1993, recommended to the General Assembly that the Czech Republic be admitted to United Nations membership. The Czech Republic was thus admitted on 19 January of that year as a Member State.

5 Zaire joined the United Nations on 20 September 1960. On 17 May 1997, its name was changed to the Democratic Republic of the Congo.

6 Egypt and Syria were original Members of the United Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite on 21 February 1958, the United Arab Republic was established by a union of Egypt and Syria and continued as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having resumed its status as an independent State, resumed its separate membership in the United Nations. On 2 September 1971, the United Arab Republic changed its name to the Arab Republic of Egypt.

(more)

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Georgia	31 July 1992
Germany ⁷	18 September 1973
Ghana	8 March 1957
Greece	25 October 1945
Grenada	17 September 1974
Guatemala	21 November 1945
Guinea	12 December 1958
Guinea-Bissau	17 September 1974
Guyana	20 September 1966
Haiti	24 October 1945
Honduras	17 December 1945
Hungary	14 December 1955
Iceland	19 November 1946
India	30 October 1945
Indonesia ⁸	28 September 1950
Iran	24 October 1945
Iraq	21 December 1945
Ireland	14 December 1955
Israel	11 May 1949
Italy	14 December 1955
Jamaica	18 September 1962
Japan	18 December 1956
Jordan	14 December 1955
Kazakhstan	2 March 1992

7 The Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic were admitted to membership in the United Nations on 18 September 1973. Through the accession of the German Democratic Republic to the Federal Republic of Germany, effective from 3 October 1990, the two German States have united to form one sovereign State.

8 By letter of 20 January 1965, Indonesia announced its decision to withdraw from the United Nations "at this stage and under the present circumstances". By telegram of 19 September 1966, it announced its decision "to resume full cooperation with the United Nations and to resume participation in its activities". On 28 September 1966, the General Assembly took note of this decision and the President invited representatives of Indonesia to take seats in the Assembly.

(more)

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Kenya	16 December 1963
Kiribati	14 September 1999
Kuwait	14 May 1963
Kyrgyzstan	2 March 1992
Lao People's Democratic Republic	14 December 1955
Latvia	17 September 1991
Lebanon	24 October 1945
Lesotho	17 October 1966
Liberia	2 November 1945
Libya	14 December 1955
Liechtenstein	18 September 1990
Lithuania	17 September 1991
Luxembourg	24 October 1945
Madagascar	20 September 1960
Malawi	1 December 1964
Malaysia ⁹	17 September 1957
Maldives	21 September 1965
Mali	28 September 1960
Malta	1 December 1964
Marshall Islands	17 September 1991
Mauritania	27 October 1961
Mauritius	24 April 1968
Mexico	7 November 1945
Micronesia (Federated States of)	17 September 1991
Monaco	28 May 1993
Mongolia	27 October 1961
Montenegro ¹⁰	28 June 2006

-
- 9 The Federation of Malaya joined the United Nations on 17 September 1957. On 16 September 1963, its name was changed to Malaysia, following the admission to the new federation of Singapore, Sabah (North Borneo) and Sarawak. Singapore became an independent State on 9 August 1965 and a Member of the United Nations on 21 September 1965.
- 10 Montenegro held a 21 May 2006 referendum and declared itself independent from Serbia on 3 June. On 28 June 2006 it was accepted as a United Nations Member State by General Assembly resolution A/RES/60/264.

(more)

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Morocco	12 November 1956
Mozambique	16 September 1975
Myanmar	19 April 1948
Namibia	23 April 1990
Nauru	14 September 1999
Nepal	14 December 1955
Netherlands	10 December 1945
New Zealand	24 October 1945
Nicaragua	24 October 1945
Niger	20 September 1960
Nigeria	7 October 1960
Norway	27 November 1945
Oman	7 October 1971
Pakistan	30 September 1947
Palau	15 December 1994
Panama	13 November 1945
Papua New Guinea	10 October 1975
Paraguay	24 October 1945
Peru	31 October 1945
Philippines	24 October 1945
Poland	24 October 1945
Portugal	14 December 1955
Qatar	21 September 1971
Republic of Korea	17 September 1991
Republic of Moldova	2 March 1992
Romania	14 December 1955
Russian Federation ¹¹	24 October 1945
Rwanda	18 September 1962

11 The Union of Soviet Socialist Republics was an original Member of the United Nations from 24 October 1945. In a letter dated 24 December 1991, Boris Yeltsin, the President of the Russian Federation, informed the Secretary-General that the membership of the Soviet Union in the Security Council and all other United Nations organs was being continued by the Russian Federation with the support of the 11 member countries of the Commonwealth of Independent States.

(more)

<u>Member</u>	<u>Date of Admission</u>
Saint Kitts and Nevis	23 September 1983
Saint Lucia	18 September 1979
Saint Vincent and the Grenadines	16 September 1980
Samoa	15 December 1976
San Marino	2 March 1992
Sao Tome and Principe	16 September 1975
Saudi Arabia	24 October 1945
Senegal	28 September 1960
Serbia ¹²	1 November 2000
Seychelles	21 September 1976
Sierra Leone	27 September 1961
Singapore	21 September 1965
Slovakia ¹³	19 January 1993

- 12 In a letter dated 3 June 2006, the President of the Republic of Serbia informed the Secretary-General that the membership of Serbia and Montenegro was being continued by the Republic of Serbia, following Montenegro's declaration of independence. On 4 February 2003, following the adoption and promulgation of the Constitutional Charter of Serbia and Montenegro by the Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia, the official name of "Federal Republic of Yugoslavia" was changed to Serbia and Montenegro. The Socialist "Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the United Nations, the Charter having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified 19 October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia. The Federal Republic of Yugoslavia was admitted as a Member of the United Nations by General Assembly resolution A/RES/55/12 of 1 November 2000.
- 13 Czechoslovakia was an original Member of the United Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 December 1992, its Permanent Representative informed the Secretary-General that the Czech and Slovak Federal Republic would cease to exist on 31 December 1992 and that the Czech Republic and the Slovak Republic, as successor States, would apply for membership in the United Nations. Following the receipt of its application, the Security Council, on 8 January 1993, recommended to the General Assembly that the Slovak Republic be admitted to United Nations Membership. The Slovak Republic was thus admitted on 19 January of that year as a Member State.

(more)

Slovenia ¹⁴	22 May 1992
Solomon Islands	19 September 1978
Somalia	20 September 1960
South Africa	7 November 1945
Spain	14 December 1955
Sri Lanka	14 December 1955
Sudan	12 November 1956
Suriname	4 December 1975
Swasiland	24 September 1968
Switzerland	10 September 2002
Sweden	19 November 1946
Syria ¹⁵	24 October 1945
Tajikistan	2 March 1992
Thailand	16 December 1946
The former Yugoslav Republic of Macedonia ¹⁶	8 April 1993
Timor Leste	27 September 2002
Togo	20 September 1960










-
- 14 The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the United Nations, the Charter having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified 19 October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia. The Republic of Slovenia was admitted as a Member of the United Nations by General Assembly resolution A/RES/46/236 of 22 May 1992.
- 15 Egypt and Syria were original Members of the United Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite on 21 February 1958, the United Arab Republic was established by a union of Egypt and Syria and continued as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having resumed its status as an independent State, resumed its separate membership in the United Nations.
- 16 The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the United Nations, the Charter having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified 19 October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia. By resolution A/RES/47/225 of 8 April 1993, the General Assembly decided to admit as a Member of the United Nations the State being provisionally referred to for all purposes within the United Nations as "The former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of the difference that had arisen over its name.

(more)

Tonga	14 September 1999
Trinidad and Tobago	18 September 1962
Tunisia	12 November 1956
Turkey	24 October 1945
Turkmenistan	2 March 1992
Tuvalu	5 September 2000
Uganda	25 October 1962
Ukraine	24 October 1945
United Arab Emirates	9 December 1971
United Kingdom	24 October 1945
United of Republic of Tansania ¹⁷	14 December 1961
United States	24 October 1945
Uruguay	18 December 1945
Uzbekistan	2 March 1992
Vanuatu	15 September 1981
Venezuela	15 November 1945
Viet Nam	20 September 1977
Yemen ¹⁸	30 September 1947
Zambia	1 December 1964
Zimbabwe	25 August 1980

* * * *

-
- 17 Tanganyika was a Member of the United Nations from 14 December 1961 and Zanzibar was a Member from 16 December 1963. Following the ratification on 26 April 1964 of Articles of Union between Tanganyika and Zanzibar, the United Republic of Tanganyika and Zanzibar continued as a single Member, changing its name to the United Republic of Tanzania on 1 November 1964.
- 18 Yemen was admitted to membership in the United Nations on 30 September 1947 and Democratic Yemen on 14 December 1967. On 22 May 1990, the two countries merged and have since been represented as one Member with the name "Yemen".

Photo	Nama dan Masa Jabatan
	Sir Gladwyn Jebb [24/10/45-2/2/46]
	Trygve Halvdan Lie [2/2/46-10/11/52]
	Dag Hammarskjöld [10/4/53-18/9/61]
	U Thant [30/11/61-31/12/71]
	Kurt Waldheim [1/1/72-31/12/81]
	Javier Pérez de Cuéllar [1/1/82-31/12/91]
	Boutros Boutros-Ghali [1/1/92-31/12/96]
	Kofi Annan [1/1/97-31/12/06]
	Ban Ki-moon [1/1/07-31/12/11]